



**WORLD WIDE WEB  
FOUNDATION**

## RAPOR HAK-HAK DARING

# PEREM- PUAN



Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) adalah perangkat adikuasa dalam pencapaian segala hal, mulai dari peningkatan pendapatan dan perluasan akses kredit, ke pendidikan berkualitas dan sistem kesehatan bagi semua, serta pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Maka dari itu, PBB mengetengahkan TIK dalam Tujuan Pembangunan Berkesinambungan atau Sustainable Development Goals (SDGs) barunya, diiringi oleh komitmen berbagai negara untuk mencapai akses Internet yang universal dan setara gender, dan untuk meningkatkan penggunaan TIK dalam misi pemberdayaan perempuan.

Meski demikian, kesenjangan gender dalam hal akses Internet, kecakapan digital dan hak-hak daring masih perlu dijumpatani. Tahun lalu, sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh jaringan kami yang bernama Women's Rights Online, memaparkan adanya kesenjangan gender dan kemiskinan yang ekstrem dalam hal pemberdayaan digital di wilayah miskin urban di 10 kota. Perempuan memiliki kecenderungan 50% tidak terkoneksi daring dibandingkan laki-laki dan 30-50% cenderung tidak menggunakan Internet sebagai wahana pemberdayaan ekonomi dan politik.

Penelitian tersebut juga menyingkap akar masalah dari kesenjangan digital antargender: tarif mahal, kurangnya pengetahuan, kelangkaan konten baik yang relevan maupun yang mampu memberdayakan perempuan dan hambatan bagi perempuan untuk berekspresi secara bebas ataupun privat di dunia maya.<sup>1</sup>

Audit Kesenjangan Gender Digital perdana kami menindaklanjuti hasil-hasil survei tersebut dengan mempelajari upaya-upaya kebijakan dan kemajuan yang terjadi di 10 negara dalam menjawab tantangan-tantangan utama yang teridentifikasi dalam riset kami. Kami mendasarkan skor kami dalam 14 indikator sederhana (dijelaskan di bawah) yang kemudian di dalamnya hadir bukti empiris yang reliabel, dan penilaian dilaksanakan di Kuartal Kedua 2016.<sup>2</sup>

### KABAR BURUKNYA

Tak satupun dari 10 negara yang diliput melakukan tindakan yang cukup mendekati untuk mencapai target-target SDG pada tahun 2030. Hanya satu negara (Kolombia) yang mencapai peringkat kelulusan minimal, dengan angka keseluruhan 60%. Tanpa peningkatan upaya-upaya kebijakan dan investasi yang berarti, sebagian besar keuntungan kemajuan teknologi di 10 negara akan dinikmati oleh laki-laki dimana hal ini memperparah kesenjangan gender, alih-alih menguranginya.

### KABAR BAIKNYA

Pengucilan perempuan dari revolusi digital terutama disebabkan oleh lemahnya kebijakan, dan kelemahan kebijakan dapat diperbaiki. Kemajuan pesat mungkin terjadi di seluruh negara melalui langkah-langkah sederhana seperti pemotongan ongkos konektivitas, memperkenalkan literasi digital di sekolah-sekolah dan memperbanyak fasilitas akses umum. Tiap kartu rapor nasional mengemukakan lima langkah dengan konteks spesifik yang mana dapat ditilik tiap negara di tahun mendatang guna menutup kesenjangan gender digital.

1 Temuan kami didukung oleh beberapa studi lain termasuk Intel (2013), GSMA Connected Women (2015), UN Broadband Commission Working Group on Gender (2013).

2 Metodologi lengkap tersedia di situs World Wide Web Foundation.

## Mengukur Perkembangan, Mendorong Tindakan



## NEGARA KAMI MENILAI

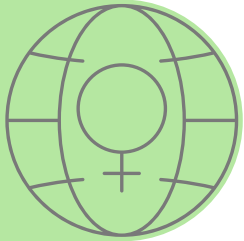
Kenya  
Uganda

Mozambique  
Nigeria

Ghana  
Egypt

Colombia  
India

Indonesia  
Philippines



SKOR RERATA:

3/10

### AKSES INTERNET & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pemerintah memiliki perjalanan panjang untuk mewujudkan seluruh komitmen SDG pada tahun 2030 dalam hal menyediakan akses teknologi baru secara adil bagi setiap perempuan dan laki-laki, dan mengambil keuntungan TIK guna pemberdayaan perempuan. Meskipun hampir seluruh perempuan yang kami survei dalam riset Hak-Hak Online Perempuan (Women's Rights Online), memiliki atau mempunyai akses telepon, revolusi TIK belum mulai mengubah kehidupan mereka. Dari negara-negara yang kami ulas, hanya Kolombia, Nigeria, India dan Ghana yang mempunyai serangkaian kebijakan nasional maupun sub-nasional dalam hal pengembangan akses, pelatihan dan penggunaan web oleh perempuan dan pemuda. Namun, dalam banyak kasus (seperti halnya negara-negara lain yang kami ulas), tidak ada target resmi yang konkrit. Laporan oleh **Kelompok Kerja Komisi Pita Lebar tentang Gender** mengungkapkan bahwa sebagian besar rencana Pembangunan Pita Lebar gagal menyertakan target-target berbasis gender (2013).

Lebih lanjut lagi, menelusuri perkembangan yang ada adalah nyaris mustahil. Saat ini, hanya 64 negara yang menyertakan data penggunaan Internet terperinci berbasis gender kepada badan PBB (Perserikatan Telekomunikasi Internasional - ITU) yang bertanggung jawab menyelidiki indikator ini. Kolombia, Mesir dan Indonesia adalah negara-negara dalam sampel kami yang memiliki rincian seperti ini. ITU tidak memiliki data dengan rincian berbasis gender di indikator-indikator penting TIK. Hal ini perlu berubah. SDG 17 meminta komitmen negara-negara untuk menyediakan lebih banyak lagi data terperinci berbasis gender yang berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan.

#### INDIKATOR:

- Kehadiran strategi TIK nasional atau rencana pembangunan pita lebar yang jelas dan memiliki tenggat kesetaraan gender, disertai dengan bujet penerapan (Sumber: Web Index dengan review terbaru).
- Persentase perempuan yang memiliki akses Internet (Sumber: Women's Rights Online)
- Kesenjangan gender dalam hal akses Internet (Sumber: Women's Rights Online dan Survei Pew Global Attitudes)
- Pemberdayaan perempuan melalui web (Sumber: Women's Rights Online)<sup>3</sup>
- Kumpulan data TIK nasional terperinci jenis kelamin (Sumber: ITU)



SKOR RERATA:

5/10

### KETERJANGKAUAN

SDGs menuntut para pemerintah untuk berusaha mencapai akses Internet yang terjangkau dan universal di tahun 2020. Namun **tarif mahal** mengucilkan milyaran perempuan dari Internet. Perempuan --- yang **memiliki pendapatan 25% lebih rendah** dari laki-laki secara global --- adalah yang terutama terkena imbas akibat mahalnya tarif koneksi Internet, dan sebagai hasilnya mereka menghadapi keterbatasan dalam meraih kesempatan-kesempatan digital. Negara-negara seperti Uganda dan Mozambik yang memiliki tarif koneksi Internet termahal (dibandingkan dengan proporsi pemasukan rata-rata per kapita) memiliki jumlah terendah dalam hal perempuan yang terkoneksi ke Internet dan kesenjangan gender di Internet tertinggi. Di Uganda, 1GB layanan pita lebar nirkabel memiliki harga lebih dari 22% dari pemasukan rata-rata bulanan. Di Mozambik, layanan yang sama memiliki harga yang setara dengan 10% pemasukan rata-rata bulanan

Hanya Kolombia, Indonesia dan Filipina yang mencapai **target baru keterjangkauan tarif** yang diperkenalkan Alliance for Affordable Internet dimana tarif 1GB dihargai di 2% atau kurang dari rata-rata pendapatan bulanan. Mesir berada di angka 2.15%, memburuk sejak 2014, dimana sebenarnya mereka mampu berada di target kurang dari 2%.

Kolombia berupaya paling ekstensif dalam hal meningkatkan akses Internet gratis atau akses murah di tempat-tempat umum, diikuti oleh Mesir, Indonesia dan Filipina. Komitmen Kenya baru-baru ini untuk menyediakan Wi-Fi gratis di perpustakaan dan kota-kota di negara tersebut, merupakan tanda kemajuan.

#### INDIKATOR:

- Keterjangkauan tarif sambungan ke Internet (tarif 1GB mobile data sebanding dengan proporsi pendapatan rata-rata bulanan) (Source: ITU<sup>4</sup> dan Bank Dunia)
- Adanya kebijakan-kebijakan spesifik untuk meningkatkan akses Internet gratis atau murah di tempat-tempat umum (contoh: alokasi bujet untuk akses Internet di perpustakaan umum, sekolah-sekolah dan pusat pemberdayaan komunitas; pengadaan spektrum gratis untuk Wi-Fi komunitas) (Sumber: Alliance for Affordable Internet)

3 Berikut adalah indikator komposit yang menyertakan data persentase perempuan yang menggunakan Internet untuk alasan: a) mencari kerja, b) mencari informasi, c) mengutarakan pendapat dalam jaringan.

4 Kami menggunakan estimasi harga 2015 yang diluncurkan ITU bulan Juli 2016. Versi teranyar data ini akan tersedia bulan November 2016, dan mungkin akan memiliki beberapa revisi. Meski demikian, harus disadari bahwa harga-harga di beberapa negara yang kami liput telah turun signifikan saat data dipublikasikan.



#### INDIKATOR:

- Proporsi pengajar TIK yang handal di sekolah-sekolah (Sumber: UNESCO)
- Persentase perempuan di bidang riset teknologi dan mesin dan pembangunan (Sumber: UNESCO)
- Sekolah-sekolah menengah yang memiliki akses Internet<sup>5</sup> (Sumber: UNESCO)

## KECAKAPAN DIGITAL & PENDIDIKAN

Tidak paham bagaimana cara menggunakan Internet merupakan hambatan yang paling sering diungkapkan oleh perempuan miskin di daerah urban yang tidak menggunakan Internet di dalam studi kami. Kecakapan digital juga semakin dibutuhkan untuk memaksimalkan prospek kerja dan pendapatan perempuan. Seperti yang dikemukakan Melinda Gates baru-baru ini, “sekolah-sekolah negeri adalah satu-satunya tempat dimana kita dapat memastikan bahwa para pelajar, apapun latar belakang mereka, memiliki kesempatan” untuk memperoleh kecakapan teknologi, mulai dari literasi digital dan data dasar.

Oleh sebab itu kami melihat lebih dekat, apa yang dilakukan di berbagai negara untuk meningkatkan literasi digital massal. Kolombia, Mesir dan Indonesia telah menyediakan Internet setidaknya di 50% dari keseluruhan sekolah menenga --- sebuah langkah yang positif namun tidak cukup. Sangat disayangkan, sebagian besar negara yang disurvei menyediakan secara minim atau bahkan tidak ada sama sekali fasilitas Internet di sekolah-sekolah, pelatihan TIK bagi guru-guru, atau pelatihan literasi digital komunitas dan/atau tidak mengumpulkan data untuk mengawasi perkembangan di area-area ini.



#### INDIKATOR:

- Ketersediaan informasi yang relevan secara lokal dan ramah pengguna mengenai hak-hak reproduktif dan kesehatan seksual melalui TIK, dan layanan bagi perempuan dan pemuda (Sumber: Web Index, dengan tinjauan teranyar)
- Persentase perempuan yang menggunakan layanan keuangan nirkabel secara personal (Sumber : Database Global FinDex Bank Dunia)

## TINGKAT RELEVANSI KONTEN DAN LAYANAN

Akibat beban ekstra dari pekerjaan mengasuh keluarga tanpa bayaran yang diemban perempuan, mereka tidak hanya memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan laki-laki, tetapi juga memiliki waktu luang yang lebih terbatas. Akibatnya, waktu dan uang yang digunakan di Internet menjadi sesuatu yang datang dengan kesempatan yang mahal, dan banyak perempuan yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka temukan di Internet faedahnya sebanding dengan waktu yang mereka habiskan. Meski nyatanya banyak sekali jenis konten dan jasa yang dapat menginspirasi, menghibur, dan mendampingi perempuan, kami menggarisbawahi dua hal yang penting dan berkaitan dengan hak-hak dan kesempatan bagi mereka, dan berkaitan langsung dengan target-target SDG: (1) ketersediaan informasi daring mengenai kesehatan seksual dan reproduktif dan (2) layanan-layanan keuangan digital. Kenya memimpin dalam dua hal ini, dengan adanya 55% perempuan menggunakan jasa-jasa layanan keuangan nirkabel (World Bank). Namun, akses kaum perempuan atas fasilitas perbankan nirkabel masih rendah di sebagian besar negara-negara lain, selain itu informasi yang ramah pengguna, relevan bagi pengguna lokal mengenai informasi hak-hak kesehatan seksual dan reproduktif sangatlah jarang.



#### INDIKATOR:

- Seberapa jauh badan-badan penegak hukum dan pengadilan-pengadilan mengambil tindakan dalam kasus-kasus yang menyangkut kekerasan berbasis gender yang menggunakan perangkat TIK (Source: Web Index, dengan tinjauan teranyar)
- Keberadaan dan tingkat kematangan hukum-hukum tingkat nasional perihal perlindungan data (Sumber: Barometer Open Data)

## KEAMANAN ONLINE

Para perempuan yang kami survei mengaku bahwa mereka menilai Internet sebagai wilayah yang aman untuk diakses dan berbagi pendapat dan berbagai jenis informasi serta mengekspresikan diri mereka tanpa rasa takut. Meski vital bagi SDG 16 – Perdamaian, Keadilan dan Institusi-institusi Kuat – peran Internet sebagai wilayah aman bagi kebebasan berekspresi perempuan kini terancam oleh merebaknya pelecehan dan kekerasan daring atas kaum perempuan, serta pelanggaran atas hak-hak privasi pengguna Internet. Seperti pernyataan Lyon (2003:1), “Aksi pemintaan masa kini mengelompokkan orang ke dalam berbagai kategori, menyematkan harga atau risiko yang berdampak langsung pada kesempatan mereka dalam kehidupan nyata. Terjadi diskriminasi mendalam yang menjadikan aksi pemintaan bukan hanya perkara privasi individu namun keadilan sosial.” Jika tren ini tidak berubah, penyebaran TIK dapat memperparah pola diskoneksi dan pembungkaman perempuan di luring (luar jaringan/offline).

Meski demikian, kerangka hukum untuk melindungi hak privasi di era digital adalah tidak efektif atau bahkan absen di negara-negara yang ditinjau. Meski beberapa negara, contohnya Uganda memiliki rancangan undang-undang perlindungan privasi data pribadi, namun rancangan tersebut penting untuk ditinjau guna memastikan rancangan tersebut cukup kuat untuk menghentikan diskriminasi atau represi berdasarkan penyalahgunaan data personal dan komunikasi pribadi.

5 Di berbagai kasus, kenyataan menyeluruh akses Internet yang ada di sekolah-sekolah mungkin tersendat dibandingkan dengan data yang pemerintah laporkan kepada UNESCO untuk indikator ini.

## KESIMPULAN

### AGENDA TINDAKAN KAMI: SARAN UMUM DARI LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN NASIONAL 10 NEGARA

Kemajuan menuju kesetaraan gender daring harus berdasarkan solusi-solusi yang dipimpin dan dimiliki oleh pemangku-pemangku kepentingan lokal dan menjawab realitas-realitas di lapangan. Tiap langkah tindakan nasional 10 negara ini dikembangkan oleh mitra-mitra negara dari WRO, yang sebelumnya dikonsultasikan dengan pemangku-pemangku kepentingan lokal lainnya seperti aparat pemerintah, kelompok komunitas, dan komunitas perdagangan. Tiap pemangku kepentingan adalah berbeda, namun mereka memiliki kesamaan prioritas yang kuat.

Kami mengusulkan agar prioritas bersama ini dijadikan titik tolak guna menuju konsultasi regional dan global, sehingga terwujud kesepakatan agenda tindakan internasional. Dengan bekerja sama mengentaskan kesenjangan gender digital, kita dapat memastikan bahwa kekuatan TIK dan Internet yang sesungguhnya dapat berfaedah bagi perempuan, menjadikan peran mereka di garda depan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkesinambungan.

### TARGET

- Memadukan tujuan-tujuan konkrit berbasis keadilan gender, didukung dengan alokasi budget yang memadai, ke dalam kebijakan-kebijakan TIK nasional dan/atau rencana pembangunan pita lebar.
- Memonitor kesetaraan gender dalam implementasi strategi-strategi TIK dengan mengumpulkan data terperinci berdasarkan gender, pemasukan dan lokasi. Mengembangkan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang mengukur inisiatif TIK publik dan dampaknya bagi perempuan.

### AKSES

- Memprioritaskan reformasi kebijakan guna menghilangkan tarif penghambat konektivitas. Mengupayakan target keterjangkauan tarif sesuai rujukan Alliance for Affordable Internet: tarif prabayar mobile data 1 GB tidak melebihi 2% dari rata-rata pendapatan bulanan per kapita.
- Mengembangkan akses Internet gratis di tempat-tempat umum, termasuk semua sekolah, klinik, pusat pengembangan kerja, dan pusat pengembangan komunitas.
- Meningkatkan infrastruktur dan mendukung pengembangan inovatif konektivitas model last-mile, termasuk yang dikembangkan oleh perkumpulan dan organisasi perempuan.
- Mempertimbangkan langkah-langkah akses yang secara spesifik ditujukan bagi perempuan, seperti mengalokasikan basic data gratis bagi perempuan.

### KECAKAPAN

- Memadukan literasi digital dasar dalam kurikulum sekolah di seluruh jenjang – mulai dari pendidikan dasar hingga universitas – dan memastikan bahwa para guru memiliki kualifikasi dan memperoleh dukungan di dalam mengajar bidang tersebut.
- Memastikan literasi digital mencakup lebih dari sekedar kecakapan teknis guna mendukung kecakapan perempuan dan pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan dalam menentukan pilihan hidup.
- Mendukung pengusaha-pengusaha mikro perempuan untuk memiliki kecakapan digital.

### KONTEN

- Mengembangkan ketersediaan layanan-layanan pemerintah dan data daring serta kanal-kanal bagi masyarakat untuk melibatkan para pemimpin dan PNS melalui TIK.
- Mengutamakan ketersediaan secara masif informasi yang ramah pengguna dan dalam bahasa lokal, serta layanan-layanan dan produk-produk yang memberdayakan perempuan dan meningkatkan kehidupan mereka.
- Mengaudit seluruh situs web aparat pemerintah untuk menilai relevansi konten mereka bagi perempuan dan tingkat efektivitas mereka di dalam mendukung perempuan mengakses informasi.

### HAK-HAK

- Memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak online dan privasi baik perempuan maupun laki-laki, termasuk juga dalam memperkuat hukum-hukum perlindungan data
- Memastikan para perempuan dan pemuda mampu menempuh jalur hukum terhadap pelaku kekerasan online, dan bahwa polisi serta perangkat peradilan memiliki pelatihan dan sumber daya memadai untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud.
- Berinvestasi dalam skala besar dan berkesinambungan untuk kampanye kesadaran nasional untuk memberantas kekerasan gender daring dan mengedukasi pengguna mengenai hak-hak, privasi dan keamanan mereka.

## PENGAKUAN

Inisiatif ini didanai oleh UN Women dan Swedish International Development Agency (Sida)



Riset dan analisa untuk kartu-kartu rapor dikerjakan bersama dengan para anggota Women's Rights Online Network:

- Foundation for Media Alternatives
- Fundación Karisma
- ICT Watch
- International Association of Women in Radio and Television
- IT for Change
- Media Foundation for West Africa
- Paradigm Initiative Nigeria
- Science Innovation Information and Communication Technology Research Institute (SIITRI)
- Tadwein Gender Research Centre
- Women of Uganda Network (WOUGNET)



**WORLD WIDE WEB  
FOUNDATION**

# Mengukur Perkembangan, Mendorong Tindakan